

## **Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Terhadap Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Desa di Era Smart Village: Studi Kasus di Kecamatan Tolinggula**

**Dwi Prastiani Ibrahim, Sahmin Noholo, Siti Pratiwi Husain**

Universitas Negeri Gorontalo

dwi974586@gmail.com, sahminnoholo@ung.ac.id, pratiwi.husain@ung.ac.id

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of accountability and reporting transparency on the digitalization of village financial management in the Smart Village era in villages located in Tolinggula District, North Gorontalo Regency. This research employed a quantitative method with a verificative approach and causal research design. Data were collected through questionnaires distributed to village officials involved in village financial management. The data were analyzed using multiple linear regression analysis to determine the partial and simultaneous effects of the independent variables on the dependent variable. The results indicate that accountability does not have a significant effect on the digitalization of village financial management. This condition occurs because the implementation of accountability is still administrative and manual, so it has not been fully integrated into digital systems. Meanwhile, reporting transparency has a positive and significant effect on the digitalization of village financial management. The higher the level of reporting transparency, the higher the implementation of digitalization in village financial management. Simultaneously, accountability and reporting transparency significantly affect the digitalization of village financial management in the Smart Village era. This study concludes that the digitalization of village financial management is more strongly influenced by reporting transparency than accountability. Therefore, strengthening digital system integration, improving human resource competencies, and developing information technology infrastructure are necessary to support the realization of effective, transparent, accountable, and Smart Village-based village governance.*

**Keywords:** *Accountability, Reporting Transparency, Digitalization, Village Financial Management, Smart Village.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pelaporan terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa di era Smart Village pada desa-desa di Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan verifikatif dan jenis penelitian kausal. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Analisis data dilakukan menggunakan uji regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh parsial dan simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan karena penerapan akuntabilitas masih bersifat administratif dan manual sehingga belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem digital. Sementara itu, transparansi pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi tingkat

transparansi pelaporan, maka semakin tinggi pula penerapan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan desa. Secara simultan, akuntabilitas dan transparansi pelaporan berpengaruh signifikan terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa di era Smart Village. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa lebih banyak didorong oleh transparansi pelaporan dibandingkan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi sistem digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengembangan infrastruktur teknologi informasi guna mendukung terwujudnya tata kelola desa yang efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis Smart Village.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Transparansi Pelaporan, Digitalisasi, Pengelolaan Keuangan Desa, Smart Village.

## **PENDAHULUAN**

Desa adalah representasi dari kelompok masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan berkembang seiring dengan sejarah bangsa Indonesia. Mereka merupakan bagian penting dari struktur negara. Menurut Ferdiansyah *et al.*, (2025) Desa adalah unit administratif terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia, memiliki otoritas untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah desa berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat.

Kebutuhan akan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan efisien semakin meningkat seiring dengan peningkatan dana yang dikurangkan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya. Dalam konteks ini akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi komponen penting yang menentukan keberhasilan Pembangunan desa dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Ra'is & Rini, 2024). Secara teoritis, dua pilar utama akuntansi sektor publik yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah adalah akuntabilitas dan transparansi. Penelitian telah menunjukkan bahwa kedua faktor ini memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan mencegah penyimpangan dalam penggunaan dana desa (Suliyatini (2025). Selain itu, kemajuan teknologi informasi mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan desa melalui penerapan sistem seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Konsep *Smart Village* mencakup penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik di desa. Digitalisasi pengelolaan keuangan desa memungkinkan pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan desa secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Misalnya, Siskeudes terbukti mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penyebaran pelaporan berbasis elektronik kepada pemangku kepentingan yang lebih besar (Susano & Rachmawati, 2024).

Penggunaan istilah "*era Smart Village*" dalam penelitian ini dipilih secara sengaja dibandingkan dengan istilah "*area Smart Village*" karena memiliki dasar konseptual yang lebih tepat dalam menggambarkan fenomena yang dikaji. Istilah *era* merujuk pada suatu fase atau periode transformasi yang sedang berlangsung dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya terkait perubahan dari sistem konvensional menuju

sistem digital. Dengan demikian, *smart village* tidak dipahami sebagai batas wilayah tertentu, melainkan sebagai sebuah proses perubahan sistemik yang ditandai oleh meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain itu, dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern, *Smart Village* lebih tepat diposisikan sebagai bagian dari transformasi *smart governance* dalam era digitalisasi sektor publik. Fokus utamanya bukan pada pembatasan wilayah, tetapi pada perubahan sistem pengelolaan pemerintahan desa yang mencakup peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta digitalisasi pengelolaan keuangan desa melalui sistem seperti SISKEUDES. Oleh karena itu, penggunaan istilah *era Smart Village* lebih relevan karena menekankan dimensi perubahan, perkembangan teknologi, serta adaptasi kelembagaan desa terhadap tuntutan digitalisasi, bukan sekadar lokasi penerapan program.

Mayoritas orang, terutama mereka yang tinggal di desa, tidak memahami istilah "desa cerdas" atau "desa pintar". Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat akan belajar dan mengerti apa artinya desa cerdas atau desa pintar. Desa Cerdas, atau *Smart Village*, diperlukan karena mereka memiliki tugas besar untuk mengelola keuangan mereka secara akuntabel dan transparan. Pengelolaan keuangan desa masih menghadapi masalah dalam praktiknya. Ini termasuk sistem pencatatan yang buruk, penggunaan teknologi yang terbatas, dan kurangnya transparansi masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi digital, desa harus beradaptasi dengan menerapkan sistem pengelolaan keuangan digital. Akibatnya, gagasan *smart village* menjadi penting untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa melalui digitalisasi yang didukung oleh akuntabilitas dan transparansi pelaporan, sehingga tata kelola keuangan desa dapat berjalan lebih efisien, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat.

Masyarakat akhirnya akan memahami proses edukasi dan penguatan literasi desa cerdas ini. Karena berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, mereka akan memperoleh pemahaman yang lebih besar. Seiring perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, masyarakat sudah akrab dengan kampanye digital, pembayaran pajak, belanja online, pelayanan kesehatan, dan semakin banyaknya pelayanan digital (Addiansyah, 2024).

Dalam era digital saat ini, Digital menjadi keharusan, dan ini termasuk menjadi bagian penting dari manajemen keuangan desa. Digitalisasi pengelolaan keuangan adalah penggunaan teknologi informasi untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan bagaimana anggaran digunakan oleh suatu pemerintahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas, kejelasan, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa serta mengurangi kemungkinan kesalahan dan penyalahgunaan anggaran (Ferdiansyah *et al.*, 2025).

Dalam konteks perkembangan teknologi dan kebijakan *Smart Village*, desa diharapkan mampu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas tata kelola, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Santi dkk 2024 yang dirujuk oleh Kusumawati *et al.*, (2025) mengatakan bahwa Salah satu faktor yang mempengaruhi digitalisasi yaitu akuntabilitas dan transparansi, Transparansi dan

akuntabilitas menjadi dua pilar utama dalam pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, terutama dalam sektor publik yang mengelola dana untuk kepentingan masyarakat. Penyalahgunaan anggaran sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan, sementara kurangnya akuntabilitas dapat mengakibatkan pengelolaan keuangan yang tidak efisien. Dalam konteks ini pemerintahan dan desa menghadapi kesulitan dalam pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan. seringkali disebabkan oleh sistem yang dilakukan secara manual, kurangnya transparansi data, serta kekurangan mekanisme kontrol yang berfungsi. Selain itu, sumber daya manusia tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem digital, yang merupakan kendala yang signifikan dalam melaksanakan digitalisasi. Studi ini menunjukkan bahwa, meskipun sistem digital seperti Siskeudes telah digunakan, aparat desa masih menghadapi tantangan dalam memahami dan menggunakan sistem tersebut (Ulya & Ruscitasari, 2025).

Permasalahan lainnya adalah belum meratanya penerapan konsep *Smart Village*, khususnya di daerah seperti Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, diperlukan solusi berupa peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan teknologi informasi, penguatan sistem digital, serta peningkatan akses internet di wilayah desa.

Transformasi digital dalam pemerintahan desa Indonesia telah sangat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, program seperti pengembangan infrastruktur internet dan pelatihan literasi digital telah meningkatkan ekonomi desa hingga 15 hingga 20 persen di beberapa daerah. Misalnya, di Kepulauan Riau, manajemen dana desa digital telah meningkatkan pelayanan publik dan akses informasi bagi warga melalui kolaborasi antara pemerintah desa dan perusahaan swasta. Namun, masalah seperti kurangnya akses ke perangkat elektronik dan literasi digital yang rendah masih menjadi hambatan di desa-desa terpencil, yang membutuhkan dukungan regulasi dan pelatihan terus menerus untuk mencapai *smart village* yang inklusif. Integrasi ini sesuai dengan tujuan nasional untuk mencapai semua desa (digides, 2024).

Contoh lain adalah Desa Cijantra, di mana evaluasi berkala terhadap *smart village* berhasil memaksimalkan pelayanan publik digital, termasuk pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan efisien. Secara keseluruhan, *smart village* tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui teknologi informasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi desa dengan mengoptimalkan literasi digital dan partisipasi masyarakat (Rafludin, 2024). Seperti yang ada di Kecamatan Tolinggula, potensi serupa dapat dimanfaatkan untuk mengatasi variasi optimalisasi aplikasi seperti SISKEUDES, sebagaimana diamati di wilayah lain.

Kecamatan Tolinggula sebagai salah satu wilayah yang sedang berkembang memiliki potensi besar dalam penerapan konsep *Smart Village*. Beberapa desa di wilayah ini telah mulai memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan pemerintahan, seperti penggunaan aplikasi SISKEUDES, media sosial resmi desa, serta digitalisasi laporan keuangan. Desa ilomangga, Salah satu desa yang ada di Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, Mulai menerapkan sistem

digitalisasi dalam pengelolaan keuangannya sejak tahun 2018. Dengan adanya sistem ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi desa seperti peningkatan efisiensi pelaporan keuangan, juga dapat membantu memperkuat akuntabilitas dan transparansi terkait pengelolaan keuangannya. Namun dalam penerapannya, pemanfaatan teknologi digital seringkali memiliki kendala. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti di kecamatan tolinggula, dapat dilihat bahwa pada desa limbato, papualangi, dan cempaka putih masih menghadapi masalah terkait pengelolaan keuangan berbasis digital. Kendala yang dihadapi seperti jaringan internet yang tidak stabil sehingga menyebabkan aparat desa harus menunggu lebih lama untuk mengakses atau mengunggah data.

Meski demikian, tingkat optimalisasi dan efektivitas penerapannya masih bervariasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi pelaporan terhadap Digitalisasi pengelolaan keuangan desa di era smart village ini dalam memberikan pelayanan publik yang efisien, transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan cerminan dari penerapan prinsip *Good Governance*, terutama pada aspek akuntabilitas.

Menurut Afriansyah (2022), Akuntabilitas berarti menggunakan media akuntabilitas yang konsisten untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan apakah tujuan suatu organisasi telah mencapai tujuan tertentu atau tidak. Laporan keuangan pemerintah desa harus disusun secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas berperan mengatur pengelolaan anggaran, Ini memastikan bahwa pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dapat menjelaskan dengan jelas bagaimana dana masyarakat akan digunakan (Puspitawati & Marsellina, 2022)

Laporan dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa banyak desa terus menghadapi masalah seperti ketidaksesuaian laporan keuangan, penyimpangan anggaran, dan ketidakmampuan aparat desa untuk memahami sistem keuangan dan pelaporan. Sebagai contoh, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023, sekitar 14,3% desa di Indonesia masih belum optimal dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan temuan utama berupa penyimpangan anggaran dan ketidaktepatan pelaporan. Hal ini semakin krusial mengingat alokasi dana desa dari APBN terus meningkat, mencapai Rp70 triliun pada tahun 2024, yang menuntut pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan inefisiensi. Di konteks ini, transformasi digital menjadi solusi potensial untuk meningkatkan aksesibilitas informasi keuangan secara real-time (Ra'is & Rini, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya bertanggung jawab.

Sistem akuntansi yang menghasilkan data akurat, kredibel, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Dengan demikian, agen (sebagai pemegang amanah) dikehendaki untuk mempertanggungjawabkan, menunjukkan, melaporkan, dan mengungkapkan segala

macam tindakan kepada prinsipal (sebagai pemberi amanah), meskipun prinsipal juga memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, Mardiasmo (2002) yang dirujuk oleh (Kutu Goo & Sanda, 2022).

Menurut Pasal 4 Ayat 7 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah No. 13 Tahun 2006, transparansi adalah prinsip yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah, transparansi menjadi sangat penting untuk menjalankan mandat rakyat. Menurut Krina (2003) yang dirujuk oleh Ngakil & Kaukab, (2020) Transparansi adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk mengetahui tentang penyelenggaraan pemerintah, termasuk informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.

Dalam era *Smart Village*, Digitalisasi menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menghadirkan sistem yang lebih terstruktur, otomatis, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Melalui penerapan teknologi, proses pencatatan keuangan dapat dilakukan secara real-time, sehingga setiap transaksi memiliki jejak digital yang jelas dan mudah ditelusuri (Kusumawati *et al.*, 2025).

Syarat utama untuk mewujudkan *Smart Village* adalah infrastruktur TIK yang memadai, yang mencakup akses internet, perangkat teknologi, dan sistem aplikasi pemerintahan desa. Infrastruktur ini memungkinkan digitalisasi tata kelola, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa melalui sistem informasi seperti SISKEUDES, yang memungkinkan proses perencanaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan menjadi lebih terintegrasi dan efisien (Tam (2024); Natalia (2025); Ferdiansyah (2025))

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh akuntabilitas dan transparansi pelaporan terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa di era *Smart Village*, dengan fokus studi kasus di Kecamatan Tolinggula. Karena kurangnya penelitian yang secara simultan menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam konteks Smart Village dan pada wilayah tertentu seperti Kecamatan Tolinggula.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat besarnya dana desa yang dikelola setiap tahunnya sehingga memerlukan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi yang baik, pengelolaan keuangan desa berpotensi menimbulkan penyimpangan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Digitalisasi juga merupakan bagian dari transformasi menuju Smart Village, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Ini memungkinkan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara lebih jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasilnya diharapkan dapat membantu meningkatkan tata kelola pemerintahan desa berbasis digital dan membantu pemerintah membuat rencana pengembangan *Smart Village* yang tahan lama juga mencegah ketertinggalan dibandingkan wilayah

lain dan untuk memberikan bukti empiris yang dapat mendukung kebijakan, seperti pelatihan literasi digital dan regulasi pendukung, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dan pembangunan desa yang berkelanjutan, juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dan daerah untuk meningkatkan tata kelola, sehingga mendukung pembangunan nasional yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian verifikatif/kuantitatif yang difokuskan kepada pengaruh akuntabilitas dan transparansi pelaporan terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa di era smart village pada desa-desa di Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara.

Menurut (Sugiyono, 2019:16) Metode kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, di mana data yang digunakan bersifat objektif dan dapat diukur secara statistik. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kausal, karena bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga dapat diketahui hubungan sebab-akibat di antara variabel-variabel yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Era *Smart Village***

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tolinggula tidak hanya dipahami sebagai fenomena statistik, tetapi harus dilihat sebagai indikasi adanya persoalan mendasar dalam praktik tata kelola desa. Secara normatif, akuntabilitas selalu diasumsikan sebagai pendorong utama perbaikan sistem, termasuk digitalisasi. Namun, temuan penelitian ini justru membalik asumsi tersebut dengan menunjukkan bahwa akuntabilitas yang ada belum mampu mendorong transformasi digital, sehingga mengindikasikan bahwa akuntabilitas yang diterapkan masih bersifat prosedural, bukan substantif. Ada beberapa aparat masih melakukan perekapan laporan secara berulang dan secara manual sebelum dimasukkan ke sistem, serta pencatatan transaksi keuangan masih buku kas fisik atau microsoft excel sederhana.

Dalam perspektif Teori Keagenan (*Agency Theory*), akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah desa sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Akan tetapi, teori ini bersifat netral terhadap media yang digunakan, sehingga tidak ada keharusan bagi agen untuk menggunakan teknologi digital selama informasi tetap disampaikan. Celah inilah yang menjelaskan mengapa akuntabilitas tidak bertransformasi menjadi digitalisasi, karena secara praktik, aparat desa masih dapat memenuhi tuntutan akuntabilitas melalui cara-cara konvensional tanpa perlu melakukan inovasi teknologi.

kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas di tingkat desa cenderung dimaknai sebagai kewajiban administratif vertikal kepada pemerintah di atasnya, bukan sebagai bentuk pertanggungjawaban horizontal kepada masyarakat. Akibatnya, orientasi akuntabilitas tidak mendorong keterbukaan informasi yang luas, sehingga kebutuhan akan sistem digital menjadi tidak mendesak. Hal ini memperlihatkan adanya distorsi makna akuntabilitas, di mana yang seharusnya menjadi alat transparansi justru berhenti pada formalitas pelaporan.

Penggunaan konsep *smart village* dalam penelitian ini menjadi sangat relevan karena berfungsi sebagai tolok ukur ideal terhadap kondisi empiris di lapangan. Smart Village menuntut integrasi antara tata kelola dan teknologi, di mana digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Namun, hasil penelitian ini justru mengungkap adanya gap yang jelas antara konsep dan praktik, di mana akuntabilitas belum bertransformasi menjadi bagian dari ekosistem digital. Dengan kata lain, Kecamatan Tolinggula belum sepenuhnya berada dalam tahap Smart Village, melainkan masih berada pada fase transisi menuju digital governance.

Secara tegas dapat dikatakan bahwa tidak signifikannya pengaruh akuntabilitas terhadap digitalisasi bukan sekadar hasil penelitian, tetapi merupakan kritik terhadap praktik tata kelola desa yang belum adaptif terhadap perkembangan teknologi. Digitalisasi dalam konteks ini lebih didorong oleh tuntutan transparansi dan tekanan keterbukaan informasi publik, bukan oleh kesadaran akuntabilitas itu sendiri. Oleh karena itu, jika akuntabilitas tidak direkonstruksi menjadi berbasis digital, maka konsep Smart Village berpotensi hanya menjadi jargon kebijakan tanpa implementasi yang substantif.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan beberapa studi sebelumnya yang menemukan bahwa akuntabilitas memengaruhi digitalisasi secara signifikan. Temuan Ferdiansyah (2025) menyimpulkan ada bukti bahwa akuntabilitas membantu digitalisasi pengelolaan keuangan desa. Alfiani & Estiningrum (2021) menemukan bahwa Akuntabilitas sangat membantu pengelolaan keuangan desa.

Oleh karena itu, kurangnya pengaruh akuntabilitas terhadap digitalisasi tidak berarti akuntabilitas tidak penting. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas belum bergantung pada teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menggabungkan prinsip akuntabilitas dengan sistem digital agar dapat sejalan dengan gagasan Smart Village dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa dengan cara yang lebih modern dan efisien.

## **Pengaruh Transparansi Pelaporan Terhadap Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Desa di Era *Smart Village***

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) yang dilakukan, diketahui bahwa transparansi pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, Hipotesis yang diajukan diterima.

Koefisien regresi sebesar 0,542 menunjukkan bahwa semakin tinggi transparansi pelaporan, maka digitalisasi pengelolaan keuangan desa juga akan meningkat, dengan pengaruh sebesar 0,542 untuk setiap kenaikan satu satuan.

Artinya, semakin tinggi tingkat transparansi, maka semakin tinggi pula penerapan sistem digital dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam konsep *smart village*, transparansi merupakan bagian penting dari *smart governance*, dimana pemerintah desa dituntut untuk menyajikan informasi secara terbuka, memberikan akses data kepada masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan publik. Untuk mewujudkan hal tersebut, teknologi digital menjadi alat utama. Oleh karena itu, transparansi secara langsung mendorong digitalisasi.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya, Ferdiansyah (2025) dengan hasil penelitiannya bahwa transparansi pelaporan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini juga sejalan dengan dengan penelitian Alfiani dan Estiningrum (2021), Bahwa transparansi mendorong pemerintah desa untuk meningkatkan profesionalisme dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan, dengan penggunaan sistem digital sebagai media yang efektif dalam menyampaikan informasi secara real-time dan terorganisir. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa, karena transparansi membutuhkan dukungan teknologi digital untuk mewujudkan keterbukaan informasi yang efektif, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

## **Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Terhadap Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Era *Smart Village***

Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel akuntabilitas (X1) dan transparansi pelaporan (X2) berpengaruh terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa (Y) ditunjukkan oleh hasil uji F simultan diperoleh nilai F hitung 62,618 dan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pelaporan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, hipotesis penelitian diterima.

Dalam konsep *Smart Village*, akuntabilitas merupakan bagian dari *smart governance* yang seharusnya mendorong penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas belum mampu menjadi pendorong utama digitalisasi. Hal ini dapat disebabkan oleh akuntabilitas yang masih dilakukan secara manual, juga belum terintegrasi dengan sistem digital, serta digitalisasi lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti SDM dan infrastruktur. Temuan ini didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa implementasi sistem digital desa sering terkendala oleh keterbatasan SDM, literasi digital, dan infrastruktur, sehingga belum optimal dalam mendukung akuntabilitas (Firdaus & Prihatin, 2025)

Berbeda dengan akuntabilitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap digitalisasi. Dalam *Smart Village*, transparansi menjadi faktor utama karena pemerintah desa dituntut untuk membuka informasi kepada masyarakat, memberikan akses data secara cepat, dan meningkatkan kepercayaan publik. Hal ini menyebabkan

transparansi mendorong penggunaan sistem digital sebagai media penyampaian informasi. Sistem digital seperti siskeudes memungkinkan pelaporan keuangan secara real-time, akses informasi oleh masyarakat, dan peningkatan pengawasan publik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa penggunaan sistem keuangan desa berbasis digital mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memungkinkan akses informasi secara lebih terbuka (Susano & Rachmawati, 2024).

Hasil ini juga menunjukkan bahwa meskipun secara parsial akuntabilitas tidak signifikan dan transparansi signifikan, namun secara bersama-sama kedua variabel tetap memberikan pengaruh yang kuat terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa. Artinya, digitalisasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh kombinasi tata kelola pemerintahan desa.

Dalam konsep *smart village*, digitalisasi merupakan bagian dari *smart governance* yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, memperkuat transparansi dan meningkatkan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan kombinasi antara transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam mendorong digitalisasi desa. Namun dalam praktik di kecamatan tolinggula transparansi menjadi faktor dominan dan akuntabilitas berperan sebagai pendukung. Artinya, implementasi *smart village* sudah berjalan tetapi belum sepenuhnya optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Ferdiansyah (2025), bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa. Sejalan juga dengan penelitian Dana Dan Agustina (2025), yang menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor penting dalam efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan pentingnya kedua variabel dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut teori keagenan, pemerintah desa bertindak sebagai agen, sedangkan masyarakat sebagai prinsipal. Dalam hubungan ini sering terjadi asimetri informasi, di mana pemerintah desa memiliki informasi lebih banyak dibanding masyarakat. Akuntabilitas berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban agen kepada prinsipal, transparansi berfungsi membuka akses informasi kepada masyarakat, dan digitalisasi menjadi alat untuk menyampaikan informasi tersebut secara cepat dan akurat. Dengan demikian, digitalisasi dalam *Smart Village* berperan sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi melalui transparansi dan akuntabilitas. Dalam prinsip *good governance* transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama mampu mendorong digitalisasi sebagai bentuk modernisasi tata kelola pemerintahan desa. Digitalisasi dalam hal ini menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi, sarana keterbukaan informasi, serta media pertanggungjawaban publik. Artinya akuntabilitas dan transparansi pelaporan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa di era *smart village* di Kecamatan Tolinggula. Hasil ini menunjukkan bahwa digitalisasi merupakan hasil dari penerapan prinsip *good governance*, transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam mewujudkan *smart village*, serta teknologi digital berperan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi pelaporan terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa di era Smart Village di Kecamatan Tolinggula, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa, hal ini menunjukkan bahwa meskipun akuntabilitas telah diterapkan, namun belum mampu mendorong penggunaan sistem digital secara optimal. Kondisi ini disebabkan karena akuntabilitas masih cenderung dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi digital.
2. Transparansi pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa. Artinya, semakin tinggi tingkat transparansi dalam pelaporan keuangan, maka semakin tinggi pula penerapan digitalisasi. Transparansi mendorong pemerintah desa untuk memanfaatkan sistem digital sebagai sarana penyampaian informasi yang lebih cepat, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat.
3. Akuntabilitas dan transparansi pelaporan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa, hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil dari kombinasi tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya transparansi dan akuntabilitas.
4. Dalam konteks *smart village*, digitalisasi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tolinggula sudah mulai berkemabang, namun belum sepenuhnya optimal. Transparansi menjadi faktor utama pendorong digitalisasi, sedangkan akuntabilitas masih perlu ditingkatkan terutama dalam integrasinya dengan sistem berbasis teknologi.

Secara keseluruhan digitalisasi pengelolaan keuangan desa di *era smart village* lebih dipengaruhi oleh transparansi pelaporan, sementara akuntabilitas berperan sebagai faktor pendukung yang belum optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Addiansyah, M. (2024). Desa Cerdas dan Inovasi Pelayanan Publik di Masa Endemi: Belajar dari Desa Mojowarno. *Matra Pembaruan*, 8(1), 75–88. <https://doi.org/10.21787/mp.8.1.2024.75-88>
- Afriansyah, B., Meriana, & Paddery. (2022). *Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa*. 8(2), 68–78.
- Aisyah, I., Musdalifah, M., & Diva, R. (2021). Hubungan Usia, Pendidikan, Dan Motivasi Dengan Hasil Belajar Menjahit (Studi Kasus Peserta Didik Biptak Disperindag Provinsi Jawa Tengah). *Fashion and Fashion Education Journal*, 10(2), 86–92. <https://doi.org/10.15294/ffej.v10i2.32918>
- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. 9(2), 222–

229.

- Arraniri, I. (2021). *Manajemen Sumber daya manusia* (agung anggoro Seto & jenita (eds.); 1st ed.). 2021.
- Dana, P., & Agustina, P. (2025). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*. 9(3). <https://doi.org/10.18196/rabin.v9i3.30723>
- digides. (2024). *Digital Village Transformation: A Real Manifestation of Sustainable Village Development*. <https://digitaldesa.id/artikel/transformasi-digital-desa-wujud-nyata-pengembangan-desa-berkelanjutan>
- Dr, Prof. Mardiasmo, MBA., Ak., C. (2021). *Akuntansi Sektor Publik* (terbaru).
- Eo Kutu Goo, E., & Mario Sanda, E. (2022). ANALISIS PELAKSANAAN TATA KELOLA RENCANA STRATEGIS, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DANA DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting UNIPA - Jurnal Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/10.59603/accounting.v1i1.124>
- Ferdiansyah, I., Tatmimah, I., & Muzayyanah, M. (2025). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Terhadap Digitalisasi Pengelolaan Keuangan. *Jebmak*, 4(2), 449–460.
- Firdaus, & Prihatin, P. S. (2025). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Studi Kasus Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar*. 504–510.
- Gobel, N., Blongkod, H., & Hiola, Y. (2025). *Pengaruh Aplikasi Sistem Keuangan Desa ( SISKEUDES ) Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi Pada Desa-Desa Di Kecamatan Bolaang Uki )*. 8(3), 181–193.
- Handayani, L. titi. (2023). *buku ajar implementasi teknik analisis data kuantitatif (Penelitian Kesehatan)* (1st ed.). Pt scifintech andrew wijaya.
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24–34. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17327>
- Husain, S. P., Seber, I. S., & Monoarfa, V. (2023). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. 4(1), 66–76.
- Imam Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Data Multivariate dengan program IBM SPSS 25* (9th ed.).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (n.d.). *Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure*.
- Kusumawati, N., Lestari, D. M., & Sari, G. I. (2025). *Studi Fenomenologi Digitalisasi dan Akuntabilitas Digital Keuangan Desa*. 1(1), 1–15.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo (ed.); terbaru). andi.
- Mareta, F. C., & Fakhri, F. (2024). Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6(2), 231–240. <https://doi.org/10.48093/jiask.v6i2.210>

- Muhamad Rohaedi Rafliudin, M. R. R. H. R. (2024). Implementasi Program Smart Village di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Desa Sodong). *Jurnal Silatene Sosial Humaniora*, 2(1), 12–17. <https://doi.org/10.53611/jw5bgm86>
- Nasution, I. R. (2025). Analisis Sistem Informasi Dana Desa Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi Kasus : Desa Tanjung Hataran Kabupaten Simalungun ). 19(Dd), 523–530.
- Natalia, A., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2025). *Building Digital Villages : Implementation of the Metadesa System in the Smart Village Program in Lampung Province Affiliation : 17(1)*, 59–72.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Noholo, S. (2021). Pengaruh Kompetensi SDM, Prinsip Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Suwawa Selatan. *Jambura Accounting Review*, 2(1), 66–75. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i1.28>
- Norta. (2024). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa berbasis web di mata masyarakat desa parit baru. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE) 2024*, 2(3), 1–14.
- Omer Hoshmand, M., & Ratnawati, S. (2023). Analisis Keamanan Infrastruktur Teknologi Informasi dalam Menghadapi Ancaman Cybersecurity. *Applied Information Technology and Computer Science (AICOMS)*, 2(2), 9–18. <https://doi.org/10.58466/aicoms.v2i2.1253>
- Patajangan, R., Hanasah, E., Sukirman, & Hidayati, D. (2024). Kompetensi Pedagogis Digital dalam Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran. *Academy of Education Journal*, 15(2), 1526–1534. <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i2.2535>
- Puspitawati, L., & Marsellina, B. S. (2022). PENGARUH AKUNTABILITAS DAN KETERBUKAAN INFORMASI TERHADAP KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH (Survei pada Desa diKecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat). *Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 2(2), 192–205. <https://doi.org/10.34010/jemba.v2i2.8540>
- Ra'is, D. U., & Rini\*, Y. T. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Analisa Tren Pengelolaan Dana Desa 2016-2024. *JADMENT: Journal of Administration and Development*, 1(2), 89–102. <https://doi.org/10.62085/jadment.v1i2.13>
- Riduwan, K. E., & Kuncoro, E. A. (2013). *Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis (Analisis Jalur)*.
- Saputra, M. B., & Veronika, D. (2025). *The Impact of Digitalization on Village Budget Transparency and Accountability*. 2(2), 180–185.
- Sekaran, U. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (BPE (ed.)).
- sifti Himmatius Suroiyah, C. M., & junaidi. (2025). Pengaruh Digitalisasi Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Urek-Urek Gondanglegi Kabupaten Malang. 14(01), 129–140.

- Sudjana, N. (2014). *Metode Penelitian*. Rineka, Cipta.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (P. Alfabeta (ed.); 27th ed.).
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA, cv |.
- Sugiyono, P. D. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.  
[https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=MGOs5rkAAAAJ&citation\\_for\\_view=MGOs5rkAAAAJ:a9-T7VOCCH8C](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=MGOs5rkAAAAJ&citation_for_view=MGOs5rkAAAAJ:a9-T7VOCCH8C).
- Sugiyono, P. dr. (2019). *metode penelitian kuantitatif kualitatif*.
- Suhardjo, Y., & Faisal, F. (2024). *The effect of competence and participation on accountability in village fund management with information technology as a moderating variable*. 10(2), 873–881.
- Suliyatini, M., Dewata, E., & Satriawan, I. (2025). *Transparansi, Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Desa*. *Journal of Applied Accounting*, 4(1), 66–74.  
<https://doi.org/10.52158/jaa.v4i1.1207>
- Sunyoto, D. (2013). *Metode dan instrumen penelitian (Untuk ekonomi dan bisnis)* (pertama).
- Susano, A., & Rachmawati, M. (2024). *Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)*. *EKOBIS : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 50–58.  
<https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1382>
- Syahroni, M. I. (2022). *PROSEDUR PENELITIAN KUANTITATIF*. 2(3), 43–56.
- Tam, J., Issn, E., Issn, P., Informasi, S., Primakara, U., Informatik, T., & Primakara, U. (2024). *MENUJU SMART VILLAGE*. 15(1), 124–130.
- Ulya, L. F., & Ruscitasari, Z. (2025). *Digitalisasi Keuangan Desa dan Akuntabilitas: Menilai Dampak Implementasi Siskeudes di Desa Dawung Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang*. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(5), 3464–3477. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i5.4624>
- Yusuf, F. M., Ali, Y., & Bouti, S. P. (2021). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula*. *JSAP : Journal Syariah and Accounting Public*, 4(2), 77.  
<https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.77-88.2021>